

**PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA,  
JUMLAH PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP  
PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**THE EFFECT OF LOCAL WEALTH, INCOME PER CAPITA,  
POPULATION, AND EDUCATION LEVEL ON THE PUBLICATION OF  
LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS**

Vivit Mariasari<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Pengelolaan *website* pemerintah daerah sebagai sarana dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Hanya sekitar 49,58% pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa melakukan publikasi laporan keuangan di internet. Riset ini bertujuan menguji faktor-faktor yang memengaruhi keinginan pemerintah daerah dalam melakukan publikasi laporan keuangan di internet. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset; pendapatan per kapita yang diproksikan oleh PDRB per kapita, jumlah penduduk; tingkat pendidikan yang diproksikan oleh indeks rata-rata lama sekolah. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2018--2021. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *puposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 59 sampel, dari 119 populasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Metode regresi data panel digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data *time series* dan data *cross section*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Kekayaan Daerah; Pendapatan per kapita; Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan; Publikasi Laporan Keuangan

**ABSTRACT**

*The management of the local government website to realize transparency and accountability in Indonesia has not been entirely carried out optimally, where only about 49.58% of regency/city governments in Java island publish financial reports on the internet. This research aims to examine the factors that influence the desire of local governments to publish financial statements on the internet. The independent variables used in this study are regional wealth proxied by total assets, per capita income proxied by GRDP per capita, population number, and education level proxied by the average length of schooling index. The object of research used in this study is the regency/city government*

---

<sup>1</sup> Universitas Tidar, Indonesia, [vivitmariasari03@gmail.com](mailto:vivitmariasari03@gmail.com)

Penulis Korespondensi: Vivit Mariasari

Sitasi: Mariasari, T. (2023). Pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 17(1),

Artikel masuk: 19 September 2022; Artikel diterima: 12 April 2023

*in Java Island during the 2018-2021 period. The determination of samples in this study uses the purposive sampling method, which is the determination of samples using specific criteria. The number of samples in this study was 59 samples out of 119 existing populations. The research method used in this study is the panel data regression analysis method. The panel data regression method was used because the data used in this study consisted of time series data and cross-section data. The results showed that variables of regional wealth, population, and level of education had a positive and significant influence on the publication of local government financial statements. Meanwhile, the variable per capita income does not significantly influence the publication of local government financial statements.*

**Keywords:** *Regional Wealth; Per capita Income; Population, Level of Education; Publication of Financial Statements*

## 1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang memuat informasi terkait dengan posisi keuangan suatu entitas dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh setiap entitas pelaporan dalam satu periode tertentu (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, 2016). Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh *stakeholder* untuk menilai akuntabilitas entitas yang bersangkutan serta mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, keputusan sosial, maupun keputusan politik. Laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada publik dengan berlandaskan bahwa publik berhak untuk dapat mengakses secara terbuka dan menyeluruh terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menekankan bahwa setiap informasi publik yang dihasilkan oleh setiap entitas publik harus dapat dijangkau oleh publik secara cepat, mudah, dan dengan biaya yang murah.

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) merupakan sebuah badan yang bertanggung jawab menyusun standar akuntansi sektor publik yang digunakan baik oleh pemerintah maupun organisasi sektor publik lainnya. Salah satu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IPSASB ialah International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Nomor 22 tentang *Disclosure of Financial Information about the General Government Sector* (Pengungkapan Informasi Keuangan mengenai Sektor Pemerintahan Umum).

IPSAS 22 menjelaskan kewajiban setiap pemerintah dan entitas publik lainnya untuk melakukan pengungkapan seluruh informasi keuangannya kepada publik. Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga dengan seluruh segmen, yaitu aktivitas pada sebuah entitas pemerintahan yang layak untuk dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan entitas tersebut (Hoesada, 2019).

Transparansi menjamin kebebasan setiap *stakeholder* untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, di antaranya informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, hingga luaran yang dihasilkan (Krina, 2003). Pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkup pemerintahan (*e-government*) mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pentingnya pelaksanaan *e-government* adalah untuk meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan publik. Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet oleh pemerintah daerah lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Afryansyah, 2013).

Pengelolaan *website* pemerintah daerah sebagai sarana dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memaksimalkan *website* sebagai media penyampaian informasi keuangan yang dikelolanya. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. Berdasarkan *website* pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi di seluruh Pulau Jawa, persentase pemerintah daerah yang melakukan publikasi laporan keuangan melalui *website* resminya masih cukup rendah, sebesar 49,58%. Angka tersebut belum menyentuh setengah dari jumlah pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa. Beberapa *website* pemerintah daerah belum menyediakan laporan keuangannya secara lengkap. Bahkan, terdapat *website* yang tidak menyediakan akses masyarakat terhadap laporan keuangan dan hanya digunakan sebagai media publikasi program-program pemerintah.

**Tabel 1. Persentase Publikasi LKPD di Pulau Jawa**

Pemerintah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Publikasi LKPD di Website		Jumlah Kab/Kota yang Tidak Melakukan Publikasi LKPD di Website		Jumlah Kab/Kota	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Jawa Timur	12	31.58%	26	68.42%	38	100%
Jawa Tengah	23	66.71%	12	34.29%	35	100%
Jawa Barat	13	48.15%	14	51.85%	27	100%
Banten	4	50%	4	50%	8	100%
DKI Jakarta	2	33.33%	4	66.67%	6	100%
DIY	5	100%	0	0%	5	100%
Total	59	49.58%	60	50.42%	119	100%

Sumber: Website pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2022

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi atau memotivasi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangannya kepada *stakeholder*. Faktor pertama yang diduga memengaruhi publikasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah kekayaan daerah, aset daerah dinilai lebih rentan terhadap adanya penyalahgunaan. Hal ini mendorong pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan yang dikelolanya, dengan tujuan agar tidak terjadi asimetri informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada *stakeholder*. Akibatnya, kepercayaan *stakeholder* terhadap pemerintah daerah juga akan meningkat.

Pratama *et al.*, (2015) mengungkapkan pengaruh positif dan signifikan antara total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan publikasi laporan keuangan di internet. Aset yang besar cenderung meningkatkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi sehingga akan meningkatkan biaya pengawasan terhadap aset daerah tersebut. Oleh sebab itu, untuk menekan biaya pengawasan yang tinggi, pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan transparansi keuangannya kepada publik untuk menghindari asimetri informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Dengan demikian, alternatif yang pemerintah daerah lakukan adalah melakukan publikasi laporan keuangan secara sukarela di internet. Hal ini karena internet merupakan sarana penyampaian informasi yang cepat,

mudah, dan murah sehingga biaya yang digunakan sebagai biaya pengawasan kinerja pemerintah juga dapat ditekan.

Akan tetapi, beberapa penelitian terkait dengan total aset daerah menunjukkan bukti empiris bahwa tidak terdapat hubungan antara total aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dan publikasi laporan keuangan di internet. Salah satu penelitian yang membuktikan tidak adanya hubungan antara total aset dan publikasi laporan keuangan di internet ialah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Prabowo (2016). Afryansyah (2013) mengungkapkan bahwa kekayaan daerah yang diprosikan oleh total aset pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap publikasi laporan keuangan secara sukarela di internet. Hal ini disebabkan oleh hasil rata-rata total aset pemerintah daerah di Indonesia masih terbilang cukup rendah sehingga mengakibatkan keingintahuan masyarakat terkait pengelolaan aset daerah menjadi rendah. Akibatnya, pemerintah menganggap bahwa pengungkapan laporan keuangan tidak terlalu diperlukan lagi.

Faktor selanjutnya adalah pendapatan per kapita yang merupakan rata-rata dari pendapatan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah. Pendapatan per kapita yang tinggi cenderung meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga jumlah permintaan akan publikasi laporan keuangan di internet akan semakin tinggi (Styles & Tennyson, 2007).

Pendapatan per kapita yang tinggi akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet yang lebih baik. Dengan kata lain, ketika suatu daerah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, teknologi informasi dan ketersediaan internet sebagai penunjang *internet financial reporting* akan lebih baik dibandingkan daerah dengan pendapatan per kapita yang rendah.

Beberapa penelitian membuktikan secara empiris bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendapatan per kapita dan publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita dianggap prestasi pemerintah daerah dalam mengelola kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah akan memublikasikan laporan keuangannya kepada publik melalui internet agar masyarakat umum dan *stakeholder* lainnya dapat mengetahui keberhasilan kinerja

pemerintah daerah dalam mengelola kesejahteraan masyarakatnya (Saraswati, Budiarti, & Sudiby, 2019). Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu daerah semakin tinggi pula tingkat *potical monitoring* yang dilakukan oleh masyarakat (Masra & Sari, 2020).

Wicaksono dan Prabowo (2016) mengungkapkan hasil yang sebaliknya. Hasil penelitian mereka mengungkap tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan per kapita dan publikasi laporan keuangan di internet. Pendapatan per kapita merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet. Akan tetapi, hal ini tidak memengaruhi keingintahuan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan internet untuk keperluan pribadi, seperti *fashion* dan gaya hidup. Kemungkinan lain karena munculnya rasa tidak percaya terhadap pemerintah sehingga masyarakat acuh terhadap kinerja pemerintah.

Tingginya asimetri informasi biasanya terjadi di lingkungan yang memiliki populasi besar. Asimetri informasi dapat menimbulkan mosi tidak percaya terhadap suatu entitas. Oleh sebab itu, salah satu alternatif yang pemerintah daerah pilih untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah ialah memublikasikan laporan keuangan yang positif dan dapat dipercaya melalui internet. Dengan demikian, diharapkan jangkauan penyebaran informasi keuangan akan semakin luas, lebih efisien, serta efektif (Pratama *et al.*, 2015).

Afryansyah (2013) mengungkapkan bahwa jumlah kepadatan penduduk suatu daerah tidak cukup untuk memengaruhi publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah secara sukarela melalui internet. *Website* pemerintah daerah lebih digunakan sebagai media pemberitahuan kepada publik terkait hal-hal di luar data keuangan pemerintah daerah itu sendiri, misalnya sebagai bentuk publikasi kegiatan pemerintah dan pencapaian nonkeuangan pemerintah daerah (Diptyana & Rokhmania, 2018).

Untuk dapat menginterpretasikan informasi keuangan suatu entitas, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan pendidikan, masyarakat diharapkan dapat lebih *aware* terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta mampu

meningkatkan pengawasan dan *controlling* terhadap pemerintah (Dewi & Adi, 2019). Rata-rata tingkat pendidikan yang tinggi di suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Guillamón *et al.* (2016) menunjukkan bukti empiris bahwa ternyata *education level* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Berdasarkan latar belakang di atas serta adanya ketidakkonsistenan hasil uji empiris yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya atas pengaruh total aset, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet, penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi di seluruh Pulau Jawa.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kekayaan daerah, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap publikasi laporan keuangan oleh entitas publik di internet. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

## 2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

### **Teori Agensi**

Teori agensi menekankan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan aktivitas dan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah berlaku sebagai agen, yaitu pihak yang menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh prinsipal (masyarakat). Hubungan keagenan ini dapat memunculkan *moral hazard* ketika kepentingan antara prinsipal dan agen tidak sejalan. Permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan keagenan ialah konflik kepentingan dan adanya asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan

agen (Godfrey, 2010). Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat oleh prinsipal terhadap penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan teori agensi, diperlukan peningkatan akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintah atas pengelolaan kegiatan pemerintahannya agar dapat meminimalisasi terjadinya asimetri informasi yang terjadi sehingga mampu meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah pula.

### **Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan**

Kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset daerah merupakan seluruh bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah (Kawatu, 2019). Pratama *et al.* (2015) menunjukkan bukti bahwa total aset pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan pada publikasi laporan keuangan kepada masyarakat. Dengan asumsi bahwa ketika jumlah aset di suatu daerah itu besar, hal ini akan memberikan dampak terhadap tingginya biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Total aset daerah yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, diperlukan transparansi yang jelas oleh pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan kepada publik atas kinerja yang dilakukannya. Selain itu, semakin tinggi aset yang dimiliki oleh pemerintah akan menimbulkan biaya pengawasan yang semakin tinggi pula. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi biaya pengawasan serta tingginya asimetri informasi, pemerintah dapat melakukan publikasi laporan keuangannya melalui internet. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H-1: Kekayaan daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

### **Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Publikasi Laporan Keuangan**

Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Dalam penelitian ini, pendapatan per kapita yang digunakan merupakan pendapatan per kapita daerah yang diukur menggunakan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Saraswati *et al.* (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita merupakan sebuah sinyal kepada

masyarakat akan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah akan meningkatkan motivasi pemerintah daerah untuk memublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Masra dan Sari (2020) bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat *political monitoring* terhadap kinerja pemerintah daerah serta tingginya permintaan akan informasi laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Apabila permintaan akan laporan keuangan pemerintah daerah rendah, hal ini tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi. Selain itu, pendapatan per kapita daerah yang tinggi dianggap sebagai suatu keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kesejahteraan daerahnya sehingga diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangannya kepada publik di internet. Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan hipotesis penelitian kedua sebagai berikut ini:

H-2: Pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Publikasi Laporan Keuangan**

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menjadi proksi dari kompleksitas pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kompleksitas suatu daerah akan meningkatkan pula biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah akan mengambil metode pelaporan yang efektif dan efisien untuk mengurangi biaya tersebut dengan melakukan publikasi laporan keuangan di internet.

Tingginya asimetri informasi cenderung terjadi pada organisasi dengan populasi yang tinggi. Hal ini berlaku juga di suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Publikasi laporan keuangan di internet merupakan salah satu solusi untuk menyampaikan informasi keuangan secara efektif dan efisien di suatu daerah

dengan populasi yang tinggi. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga yang dibangun dalam penelitian ini adalah

H-3: Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Publikasi Laporan Keuangan**

Dewi dan Adi (2019) menunjukkan bahwa taraf pendidikan masyarakat mampu mendorong adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi dinilai memiliki kemampuan untuk memainkan perannya sebagai *stakeholder* yang berhak mendapatkan informasi terkait kinerja pemerintah daerah secara mudah dan bebas. Andriani (2015) juga mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dan publikasi laporan keuangan di internet. Dengan pendidikan, masyarakat akan memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam menginterpretasikan suatu informasi yang diterimanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakat akan lebih kritis terhadap kinerja pemerintah dan menuntut adanya transparansi dari pemerintah daerah. Hal itu akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangan di internet. Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan hipotesis penelitian keempat sebagai berikut:

H-4: Tingkat pendidikan masyarakat memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Jumlah provinsi yang ada di Pulau Jawa berjumlah enam provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DIY. Alasan peneliti memilih populasi provinsi di seluruh Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan sentra pusat perekonomian di Indonesia. Berikut tabel data terkait rata-rata pendapatan per kapita dan jumlah penduduk berdasarkan pulau di Indonesia.

**Tabel 2 Rata-rata Pendapatan Per kapita dan Jumlah Penduduk di  
 Indonesia Tahun 20180-2021**

No	Pulau	Rata-Rata Pendapatan per Kapita (dalam Jutaan)	Rata-Rata Jumlah Penduduk (dalam Ribuan)
1.	Pulau Sumatera	Rp68.823,00	3.507, 06 jiwa
2.	Pulau Jawa	Rp369.813,00	15.039,69 jiwa
3.	Pulau Nusa Tenggara	Rp44.292,00	2.990,17 jiwa
4.	Pulau Kalimantan	Rp61.858,00	1.947,07 jiwa
5.	Pulau Sulawesi	Rp30.631,00	1.955,35 jiwa
6.	Pulau Papua	Rp14.903,00	1.097,17 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut ini:

**Tabel 3 Kriteria Sampel**

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	<i>Website</i> resmi dapat diakses.	59
2.	Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit serta dapat diakses secara bebas.	59
3.	Memiliki publikasi data penyelenggaraan pemerintah.	59
Total sampel		59

Sumber: Data diolah penulis (2022)

## Definisi Operasional Variabel Penelitian

### Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah yang diproksikan dengan total aset merupakan keseluruhan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset daerah menginformasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial pada masa mendatang (Kawatu, 2019). Total aset daerah diukur dari penjumlahan akun aset lancar, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya yang

dapat diperoleh dari Laporan Neraca Pemerintah Daerah yang kemudian diubah ke dalam logaritma natural agar dapat mengurangi fluktuasi data yang berlebihan.

### **Pendapatan per kapita**

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pendapatan per kapita diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita diperoleh dari pembagian PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Adapun rumus pendapatan per kapita adalah sebagai berikut (BPS) :

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRBt}{Jumlah \text{ Penduduk}}$$

### **Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan orang atau sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat atau daerah tertentu serta hasil dari proses demografi, yang meliputi kelahiran, transmigrasi, dan kematian. Jumlah penduduk di setiap daerah tentu saja akan berbeda-beda. Variabel jumlah penduduk suatu pemerintah daerah diukur dari jumlah penduduk yang ada di pemerintah kabupaten/kota yang diperoleh dari *webiste* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

### **Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter dan pemikiran seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selain itu, pendidikan juga mengajarkan cara berpikir kritis menggunakan indeks lama sekolah masyarakat di daerah kekuasaan pemerintah daerah tersebut yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks lama sekolah adalah sebagai berikut (BPS):

$$RLS : \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$$

Keterangan:

- RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
- Xi : Lama sekolah penduduk ke-i/ yang berusia 25 tahun
- N : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

### **Publikasi Laporan Keuangan**

Publikasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat publikasi laporan keuangan di internet adalah metode *scoring* yang dikembangkan oleh Garcia (García & García-García, 2010). Penilaian indeks *scoring* dapat dilihat pada Tabel 4. Setelah *score* didapatkan, kemudian dibagi dengan jumlah maksimalnya, yaitu 18,5. Nilai *scoring* akan memperoleh nilai minimum 0 dan nilai maksimal 1.

**Tabel 4 Indeks Scoring**

Kategori	Uraian	Scoring
Informasi yang tercantum	Jumlah anggaran	1
	Neraca	1
	LRA	1
	Laporan Operasional	1
	Laporan Arus Kas	1
	Opini Audit	1
	Laporan Kinerja	1
	Renstra	1
	CaLK	1
	Data Tahun Lalu	0.75
Pelaporan Segmen	0.75	
Format	PDF	1
	Excel	0.5
	Word	0.5
	HTML	0.75
	Flash	0.75
	Power Point	0.5
Interaksi dengan pengguna	Email	1
	Forum	1
	Mailing List	1
	Aplikasi	1

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, penentuan model estimasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Metode analisis data yang

digunakan adalah analisis regresi linier data panel. Data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan lintas individu (*cross section*). Pengolahan data menggunakan aplikasi *software* Eviews 12 sehingga dalam penelitian ini data *time series* adalah periode penelitian selama empat tahun (2018--2021), sedangkan untuk data *cross section* adalah laporan neraca, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan indeks lama sekolah pada setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa. Perumusan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$PUB_{it} = \alpha + \beta_1 TA_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 PENDUK_{it} + \beta_4 PENDIK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PUB : Indeks *scoring* terhadap *website* pemerintah daerah

$\alpha$  : Konstanta

TA : Total aset pemerintah daerah

PDRB : PDRB per kapita pemerintah daerah

PENDUK : Jumlah penduduk pemerintah daerah

PENDIK : Tingkat pendidikan masyarakat di pemerintah daerah

e : Standar *error*

i : Kabupaten/kota

t : Waktu

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah yang ditentukan dengan menggunakan program Eviews-12. Berikut hasil analisis deskriptif:

**Tabel 5 Analisis Deskriptif Statistik**

	IFR	Kekayaan Daerah	PDRB per kapita	Jumlah Penduduk	Tingkat Pendidikan
Mean	0.77	6670489210248	66422153	1231.03	8.65
Max	0.89	43801722081590	769827	3800.79	11.82
Min	0.64	241525821525	17.60	121.53	5.33
Std. Dev	0.04	8154871756394	97604.98	890.59	1.60

Obesrvations	236	236	236	236	236
Cross Section	59	59	59	59	59

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata kekayaan daerah (X-1), yang berasal dari jumlah keseluruhan total aset yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Pulau Jawa selama tahun 2018--2021 sebesar Rp6.670.489.210.248,85. Jumlah aset paling tinggi sebesar Rp43.801.722.081.590,00 dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020, sedangkan jumlah aset paling rendah sebesar Rp241.525.821.525,00 dimiliki oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai rata-rata pendapatan per kapita (X-2) selama tahun 2018—2021 sebesar Rp66.422.153,00. Jumlah pendapatan per kapita tertinggi sebesar Rp769.827.000,00 diraih oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada tahun 2019, sedangkan pendapatan per kapita terendah, yaitu di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar Rp 17.600.000,00.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai rata-rata jumlah penduduk (X-3) yang ada di Pulau Jawa sebesar 1.210.434 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019, yaitu sebesar 3.800.787 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah, sebesar 121.526 jiwa, terdapat di Kota Magelang tahun 2020.

Nilai rata-rata tingkat pendidikan (X-4) yang diprosikan oleh indeks pendidikan masyarakat selama tahun 2018—2021 sebesar 8,65. Tingkat pendidikan masyarakat yang paling tinggi di daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2021 sebesar 11,82, sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang paling rendah sebesar 5,33 di daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018.

### **Analisis Regresi Data Panel**

Dalam regresi data panel, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian terlebih dahulu diubah ke dalam model estimasi, yang terdiri atas *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dari ketiga model estimasi tersebut kemudian dipilih satu model yang paling baik untuk

dilakukan pengujian regresi data panel. Uji *Chow* digunakan untuk memilih model estimasi yang paling baik: *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil uji *Chow* diperoleh nilai probabilitas *cross-section chi-square* 0.000. Nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikan (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa metode estimasi *fixed effect model* lebih baik daripada *Common Effect Model* untuk mengestimasi model. Hasil uji *Chow* dapat dilihat pada Tabel 6:

**Tabel 6 Hasil Uji Chow**

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	3904.048569	(58.173)	0.0000
<i>Cross-section Chi-Square</i>	1693.933549	58	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)

Uji selanjutnya adalah uji Hausman. Uji ini digunakan untuk menentukan model estimasi *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil uji Hausman, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0002. Nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang paling baik untuk mengestimasi model. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 7:

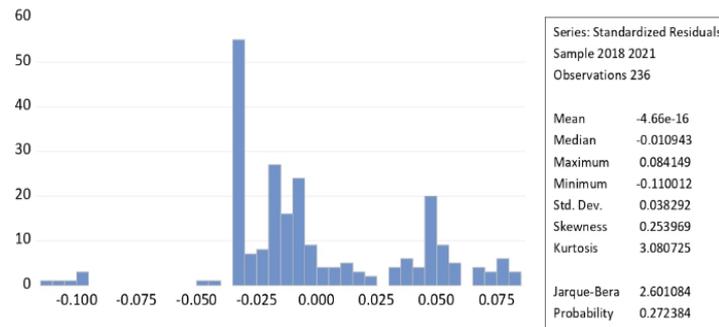
**Tabel 7 Hasil Uji Hausman**

<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section random	22.408015	4	0.0002

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)

Berdasarkan hasil output dari uji Chow dan uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang terbaik untuk mengestimasi model dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Dengan demikian, tidak perlu lagi dilakukan pengujian *Lagrange Multiplier*.

Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian normalitas data dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB). Berikut hasil pengujian normalitas:



**Gambar 1 Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Jarque Bera, nilai probabilitas sebesar 0,272384. Nilai ini lebih besar dibandingkan nilai signifikansi sebesar 0,05. Artinya, data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Multikolinearitas merupakan hubungan linier yang mendekati sempurna antara beberapa dan semua variabel bebas. Data dapat disebut terbebas dari gejala multikolinearitas apabila tidak melebihi 0,8. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 8:

**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas**

	<b>Kekayaan Daerah</b>	<b>PDRB Per kapita</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>
Kekayaan Daerah	1.000000	-0.051014	0.465738	0.199949
PDRB Per kapita	-0.051014	1.000000	-0.031417	0.600889
Jumlah Penduduk	0.465738	-0.031417	1.000000	-0.139298
Tingkat Pendidikan	0.199949	0.600889	-0.139298	1.000000

Sumber: Hasil output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)

Berdasarkan Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala multikolinearitas karena nilai koefisien korelasi dari seluruh variabel lebih kecil dari 0,8.

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu terhadap ketidaksamaan varian residual yang dilakukan dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya

heterokedastisitas, digunakan uji Glejser. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.022960	0.039674	0.578708	0.5635
Kekayaan Daerah	0.000435	0.000899	0.483694	0.6292
PDRB Per kapita	-0.001370	0.001227	-0.494683	0.6215
Jumlah Penduduk	-0.000776	0.001471	-0.527938	0.5982
Tingkat Pendidikan	-0.000138	0.000174	-0.790321	0.9789

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)

Berdasarkan Tabel 9, dapat terlihat bahwa nilai probabilitas variabel independen lebih dari nilai alpha 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji statistik selanjutnya yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan uji simultan dan uji parsial. Pengujian hipotesis tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* berikut:

**Tabel 10 Fixed Effect Model**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.346988	0.043154	8.040723	0.0000
Kekayaan Daerah	0.003148	0.001234	2.552070	0.0116
PDRB Per kapita	0.001543	0.001019	1.515146	0.1316
Jumlah Penduduk	0.026659	0.001742	15.30775	0.0000
Tingkat Pendidikan	0.007648	0.000525	14.55806	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variabls)				
Root MSE	0.001216	R-Squared		0.999281
Mean dependent var	0.765847	Adjusted R-squared		0.999023
S.D dependent var	0.045436	S.E. of regression		0.001420
Akaike info criterion	-10.05267	Sum squared resid		0.000349
Schwarz criterion	-9.128006	Log likelihood		1249.215
Hannan-Quinn criter.	-9.679932	F-Statistic		3876.612
Durbin-Watson stat	1.901824	Prob (F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa hasil *R-Squared* sebesar 0,999281. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen publikasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen kekayaan daerah, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan sebesar 99,92%. Sisanya sebesar 0,08% dijelaskan oleh variabel di luar model. Dari pengujian secara simultan didapatkan nilai *F-statistic* sebesar 3876 dengan *p-value* 0,000. Nilai tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansi (0,05) dan dalam tabel diketahui nilai *t-statistic* > *t-table* ( $3,876,612 > 2,37$ ). Dengan demikian, disimpulkan bahwa variabel kekayaan daerah, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen publikasi laporan keuangan.

Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji parsial (uji-t). Berdasarkan Tabel 10, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai probabilitas kekayaan daerah sebesar  $0,0116 < 0,05$  dan dalam tabel diketahui nilai *t-statistic* > *t-table* ( $2,552070 > 1,651$ ). Artinya kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset daerah secara positif berpengaruh signifikan pada publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Aset daerah cenderung lebih rentan karena adanya penyalahgunaan oleh oknum sehingga diperlukan sistem pengawasan yang baik terhadap aset daerah. Tingginya aset daerah meningkatkan biaya pengawasan terhadap aset daerah tersebut sehingga diperlukan metode pelaporan yang efisien untuk dapat menekan tingginya biaya pengawasan tersebut. Metode pelaporan yang dapat digunakan ialah publikasi laporan keuangan melalui internet. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2015), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara jumlah aset daerah dan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah karena hal ini dapat menekan biaya pengawasan tinggi yang disebabkan oleh besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai probabilitas PDRB per kapita sebesar  $0,1316 > 0,05$  dan dalam tabel diketahui nilai *t-statistic* < *t-table* ( $1,515146 < 1,651$ ). Artinya, pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dibangun bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Pendapatan per kapita yang tinggi akan memengaruhi kemampuan penggunaan internet masyarakat yang semakin tinggi pula. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kemampuan penggunaan internet di masyarakat lebih digunakan untuk urusan pribadi, seperti pemenuhan gaya hidup, dan hanya sebagian masyarakat tertentu yang memanfaatkan internet sebagai bentuk monitoring pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat permintaan masyarakat akan laporan keuangan pemerintah daerah. Keadaan ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa seharusnya pendapatan per kapita yang tinggi mampu menjadi faktor yang menentukan pemerintah daerah untuk memublikasikan laporan hasil kinerja keuangannya sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Begitu pula dengan pemerintah, meskipun permintaan akan laporan keuangan rendah, publikasi laporan keuangan sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaporkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Prabowo (2016) yang mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan pada publikasi laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai probabilitas jumlah penduduk sebesar  $0,0000 < 0,05$  dan dalam tabel diketahui nilai *t-statistic*  $> t-table$  ( $15,30775 > 1,651$ ). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara jumlah penduduk dan publikasi laporan keuangan di internet. Jumlah penduduk suatu daerah yang tinggi akan meningkatkan biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah akan mengambil metode pelaporan yang efektif dan efisien untuk mengurangi biaya tersebut dengan melakukan publikasi laporan keuangan di internet. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa dengan melakukan publikasi laporan keuangan di internet dapat menurunkan tingkat asimetri informasi yang diterima oleh masyarakat serta mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Pratama *et al.* (2015) yang menyebutkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah yang diproksikan oleh jumlah penduduk berpengaruh positif pada publikasi laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai probabilitas tingkat pendidikan sebesar  $0,0000 < 0,05$  dan dalam tabel diketahui nilai  $t\text{-statistic} > t\text{-table}$  ( $14,55806 > 1,651$ ). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dan publikasi laporan keuangan di internet. Indeks pendidikan merupakan proksi dari tingkat pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat mampu mendorong transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi lebih kritis dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pengelolaan keuangan pemerintah mendorong pemerintah daerah melaporkan laporan keuangannya secara rutin melalui internet. Hal ini sejalan dengan teori agensi bahwa pemerintah daerah akan melakukan publikasi laporan keuangannya, salah satunya melalui internet, untuk menunjukkan kepada masyarakat akan hasil kerjanya sehingga mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Adi, (2019) serta Andriani (2015) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan publikasi laporan keuangan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya aset daerah mampu meningkatkan publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di internet. Pemerintah daerah dengan aset yang besar cenderung membutuhkan biaya pengawasan aset yang tinggi sehingga diperlukan metode pelaporan

yang efektif dan efisien untuk meminimalisasi biaya pengawasan tersebut, yaitu publikasi laporan keuangan di internet.

2. Pendapatan per kapita yang diprosikan oleh PDRB per kapita menunjukkan tidak adanya hubungan positif terhadap publikasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita yang tinggi tidak cukup memengaruhi tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi ialah hanya golongan masyarakat tertentu yang menuntut adanya publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga karena minimnya jumlah permintaan masyarakat, motivasi pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangan menurun.
3. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi mampu meningkatkan publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Tingginya kompleksitas suatu daerah akibat besarnya jumlah penduduk suatu daerah cenderung meningkatkan terjadinya asimetri informasi sehingga untuk meminimalisasi asimetri informasi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan publikasi laporan keuangannya di internet.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada publikasi laporan keuangan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi cenderung lebih bersikap kritis atas kinerja pemerintah sehingga meningkatkan permintaan akan pelaporan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, hal itu mendorong adanya publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### **Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut.

1. Tingginya aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan meningkatkan motivasi pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangannya di internet. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akibat tingginya aset daerah tersebut.

2. Besarnya jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh pada publikasi laporan keuangan melalui internet yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan melakukan publikasi melalui internet, diharapkan jangkauan audiens lebih luas dan informasi yang disampaikan mampu diterima secara singkat oleh masyarakat.
3. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi menumbuhkan pola pikir masyarakat yang kritis sehingga tuntutan akan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah terhadap kinerja keuangannya semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan keinginan pemerintah untuk melakukan publikasi laporan keuangannya di internet.

### **Saran**

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan pendapatan per kapita yang tinggi diharapkan tetap melakukan publikasi laporan keuangannya di internet meskipun tuntutan dari masyarakat akan laporan keuangan minim.
2. Pemda dengan aset daerah yang tinggi sebaiknya melakukan publikasi laporan keuangannya secara konsisten di setiap periode sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
3. Pemerintah daerah dengan populasi penduduk yang tinggi sebaiknya melakukan publikasi laporan keuangan secara konsisten untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi yang terjadi antara publik dan pemda.
4. Pemda dengan penduduk yang memiliki rata-rata pendidikan yang tinggi sebaiknya melakukan publikasi laporan keuangan secara konsisten untuk memenuhi permintaan publik akan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan dengan publik.
5. Penulis selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat menjelaskan secara signifikan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat juga menambahkan populasi dalam lingkup yang berbeda, seperti kementerian/lembaga pemerintah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman langsung penulis dalam mengumpulkan data penelitian, terdapat keterbatasan yang dialami, yaitu beberapa data yang terkait dengan variabel penelitian tidak tersedia secara lengkap untuk tahun penelitian sehingga mengakibatkan pengurangan sampel yang digunakan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 702–712. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3460>.
- Andriani, Y. (2015). Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera. *Universitas Negeri Padang*, 2(5), 1-21.
- BPS. (n.d.-a). Indeks Lama Sekolah. Retrieved from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572>
- BPS. (n.d.-b). Perhitungan PDRB per kapita. Retrieved from <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/74>
- Candrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358-366. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322>
- Diptyana, P., & Rokhmania, N. (2018). Exploring Government Internet Financial Reporting in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 115–138. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.1039>
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695. <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506980>
- Godfrey, Jayne; Hodgson, Allan; Tarca, Ann; Hamilton, Jane; Holmes, S. (2010). *Accounting Theory* (7th ed.). Godfrey, Jayne; Hodgson, Allan; Tarca, Ann; Hamilton, Jane; Holmes, Scott.
- Guillamón, M. D., Ríos, A. M., Gesuele, B., & Metallo, C. (2016). Factors Influencing Social Media Use In Local Governments: The Case of Italy and Spain. *Government Information Quarterly*, 33(3), 460–471. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.06.005>
- Hoesada, J. (2019). *Bedah IPSAS 22 Pengungkapan Informasi Keuangan Sektor Pemerintahan Umum*.

- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublis.
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 1–25.
- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2757–2771. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246>
- Muslich Anshori, S. I. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*. Airlangga University Press.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. (2016). Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 1–269.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4986>.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden. *Atmospheric Environment*, 38(5), 3395–3404. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015>
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudiby, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 85–101. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7899>.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Article Information. *Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>.
- Wicaksono, D., & Prabowo, A. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd114) melalui Internet (IFLFR) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Media Ekonomi*, 16(1), 114. <https://doi.org/10.30595/medek.v16i1.1278>.